

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN ANGKA
KEMISKINAN KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

OLEH:

M. ALIYAFIE
NIM: 163120018

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 22 Februari 2023 M
1 Sya'ban 1444 H

Penulis



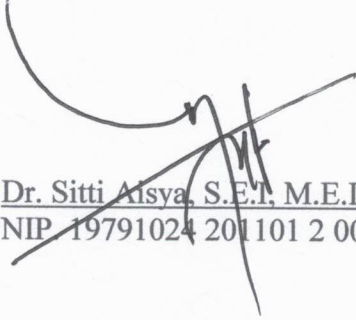
M. Aliyafie
NIM. 16.4.13.0014

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu” oleh Mahasiswa atas Nama M. Aliyafie, NIM. 16.4.13.0014 Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan di hadapan dewan penguji.

Palu, 22 Februari 2023 M
1 Sya’ban 1444 H

Pembimbing I


Dr. Sitti Aisyah, S.E.T. M.E.I.
NIP. 19791024 201101 2 007

Pembimbing II


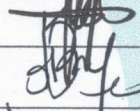
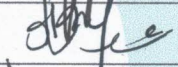
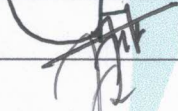
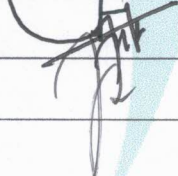

Irham Pakkawaru, S.E., MSA. Ak
NIP. 19780505 201503 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara M. Aliyafie NIM:163120018 dengan judul **“Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu”**, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 28 Februari 2023 M yang bertepatan dengan tanggal 08 Sya’ban 1444 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 22 Februari 2023 M
01 Sya’ban 1444 H

DEWAN PENGUJI

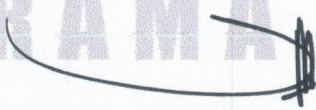
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Malkan, M.Ag.	
Munaqisy 1	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Munaqisy 2	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.	
Pembimbing1	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I, M.E.I.	
Pembimbing 2	Irham Pakkawaru, S.E., MSA. Ak	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002


Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19860507 201503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah ﷻ, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu” dengan baik.

Salawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ﷺ, beserta para sahabat, keluarga, dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun Alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do’a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang tercinta Rapi dan Ibunda Hadijah Hi. Lana yang telah membesarkan, mendidik, mendo’akan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palu beserta segenap unsur dosen dan pegawai Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palu.
3. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ibu Dr. Ermawati, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Serta Bapak Drs. Sapruddin, M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis..
4. Bapak Nur Syamsu, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Palu, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.
5. Ibu Dr. Sitti Aisyah, S.EI., M.SE.I selaku Pembimbing I dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Irham Pakkawaru, S.E., MSA., Ak selaku pembimbing II yang telah berupaya memberikan bimbingannya dan arahan serta petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Rifai, S.E., M.M selaku kepala perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.

8. Sahabat dan Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Palu seangkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat begitu tinggi kepada penulis, sehingga penulis terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Demikianlah, semoga Allah^ﷻ senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Palu, 24 Agustus 2021 M
15 Muharram 1443 H

Penulis,



M. ALIYAFIE
NIM: 16.3.12.0018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah	5
E. Garis-Garis Besar Isi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Konsep Peran	9
C. Kemiskinan	11
1. Pengertian Kemiskinan	11
2. Teori Kemiskinan	11
3. Jenis Kemiskinan	14
4. Faktor Penyebab Kemiskinan	15
5. Dampak Kemiskinan	18
6. Kemiskinan dalam Islam	21
7. Kriteria Kemiskinan	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Kehadiran Penelitian	25

D. Data dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Profil Dinas Sosial Kota Palu.....	32
C. Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu.....	58
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Sosial Kota Palu dalam Menjalankan Program Bantuan Sosial	74
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : M. Aliyafie
NIM : 16.3.12.0018
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu

Skripsi ini membahas tentang “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu”. Penulis mengadakan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Palu dengan tujuan ingin mengetahui peran Dinas Sosial Kota Palu dalam menanggulangi Kemiskinan di Kota Palu. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Palu dalam menanggulangi kemiskinan? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan memilih dengan memilih Kantor Dinas Sosial sebagai lokasi penelitian, sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu diupayakan melalui program pemberian bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Modal Usaha (BMU), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pemberian bantuan Pemerintah Bersama Dinas Sosial Kota Palu kepada masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palu sudah berjalan cukup baik. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat menjadi terbantu dalam mengatasi masalah sosial ekonominya, dengan menggunakan bantuan dari pemerintah sebagai modal usaha maupun untuk mengembangkan usaha yang pada akhirnya berpengaruh dalam mengatasi kemiskinan.

Saran peneliti kepada pemerintah Kota dan Dinas Sosial Kota Palu sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap pendataan calon penerima bantuan sosial, agar bantuan sosial yang akan diberikan lebih tepat sasaran. Selain itu, diharapkan agar Dinas Sosial Kota Palu lebih, menekankan sikap profesional kepada setiap pegawainya demi berjalannya setiap program dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan sumber daya alam, dan hal ini sudah diakui oleh banyak negara di dunia. Selain sumber daya alam yang melimpah, Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang jumlahnya pun besar, yaitu sekitar 220 juta jiwa. Yang apabila kekuatan ini dimanajemen dengan baik maka akan menjadi sumber penghasilan devisa negara yang cukup besar. Namun ironisnya, Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia, justru menjadi negara yang memiliki penduduk miskin yang cukup banyak.

Secara istilah, kata kemiskinan berasal dari kata *miskin* yang berarti tidak berharta benda atau serba kekurangan. Sedangkan kemiskinan berarti keadaan miskin. (DEPDIKBUD, 1990). Secara definitif, Komite Penanggulangan Kemiskinan dalam buku pedomannya menggunakan definisi kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: “ketidakmampuan memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energi per kapita per hari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.”¹

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang

¹Yeni Salma Barlinti, *Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan*, Lex Journalica Vol.4, No.3, 2007.

dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah.

Kemiskinan adalah masalah utama Negara yang sedang membangun termasuk Negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, kreatif dan berkesinambungan. Terjadinya kemiskinan dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya. Kemudian faktor eksternal yaitu kebijakan publik yang belum sepenuhnya merata kepada masyarakat miskin, kurangnya pengawasan terhadap terlaksananya program.

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan rakyatnya. Upaya ini juga dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera serta sebagai bukti keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Berbagai langkah strategis pemerintah daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melalui pelaksanaan program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan merupakan hal penting yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan bahwa kemiskinan akan menimbulkan

masalah-masalah lainnya seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan oleh bangsa lain. Seperti halnya kasus pembegalan yang terjadi hampir di setiap daerah perkotaan termasuk Kota Palu, salah satu alasan utama yang menjadi penyebab tindak kriminal ini yaitu ketidakmampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, permasalahan kemiskinan merupakan agenda serius yang sedang dihadapi dan ditanggulagi. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak terdapat anak-anak terlantar maupun pengemis yang berada disekeliling jalanan yang ada di Kota Palu. Di Kota Palu, jumlah kemiskinan pada tahun 2020 berada di angka 6,7%. Sementara angka tersebut tidak berbanding lurus dengan angka tingkat kesejahteraan yang di kelola oleh Dinas Sosial Kota Palu.²

Maka dari itu peran pemerintah Kota Palu sangat diperlukan dalam hal ini Dinas Sosial sebagai bagian dari Lembaga pemerintah Kota Palu yang berfokus pada pembangunan kesejahteraan sosial harusnya sangat berperan dalam menutaskan masalah kemiskinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 29 huruf C menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yaitu memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Palu telah melaksanakan berbagai program dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan, program tersebut seperti bimbingan sosial dan pemberian bantuan, baik yang sifatnya produktif maupun konsumtif. Namun demikian, beberapa masalah sering terjadi yang menyebabkan terlaksananya program

²Bapak Sarfan Da'a, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu, Wawancara tanggal 1 Desember 2021 di Kantor Dinas Sosial Kota Palu.

tidak berjalan dengan baik. Pemberian bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran sebagai salah satu faktor penghambat berjalannya program bantuan sosial seperti yang di ungkapkan oleh Pak Sarfan Da'a selaku Kepala Penanganan Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu:³

“Tim pendata yang bertugas melakukan pendataan itu biasanya tidak sportif, tidak profesional lah istilahnya, masih ada yang curang misalnya saja dengan memasukkan kerabat atau orang-orang terdekat mereka sebagai calon penerima bantuan, ya walaupun sebenarnya tidak layak secara persyaratan”.

Maka dari itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas serta pengawasan yang berlanjut guna mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam menjalankan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh penulis tersebut, maka penulis memiliki alasan yang kuat untuk mencoba melakukan penelitian ini. Dari berbagai permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Palu dalam penanggulangan kemiskinan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kota Palu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

³Bapak Sarfan Da'a, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu, Wawancara tanggal 1 Desember 2021 di Kantor Dinas Sosial Kota Palu.

- a. Untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Kota Palu dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman, dan penerapan akademisi dari teori yang ada terutama ilmu ekonomi serta kesejahteraan sosial pada umumnya dan khususnya bagi akademisi sebagai sumber bacaan, referensi, mengenai peran Dinas Sosial dalam penanggulangan angka kemiskinan kota Palu.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi mahasiswa, masyarakat kota Palu, maupun pihak-pihak yang mempunyai perhatian mengenai penanggulangan kemiskinan di Kota Palu.

D. Penegasan Istilah

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut apa saja hal-hal yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah dari judul skripsi ini yaitu “Peran Dinas Sosial dalam Penanggualangan Angka Kemiskinan Kota Palu”. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Peran

Peran ialah suatu sikap atau perilaku yang berkaitan dengan status atau kedudukan tertentu.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti menyusun garis-garis besar dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

Bab I pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi proposal ini

Bab II kajian pustaka, bab ini menguraikan penelitian terdahulu yang merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian, kajian teori merupakan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Bab III metode penelitian, bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang mencakup: pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data dan sumber data yang diperoleh dari hasil pengamatan penulis dari hasil wawancara dan informan yang terkait dengan masalah yang diteliti, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan peran dinas sosial dalam penanggulangan angka kemiskinan Kota Palu.

Bab V penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang dilaksanakan dan berhubungan dengan penelitian mengenai “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu” yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heryanti dengan judul “Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bone telah melaksanakan perannya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bone setiap tahunnya. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan yakni kurangnya anggaran dana pemerintah, kurangnya sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan.¹

Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Heryanti dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bone yang menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009, sedangkan penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Palu. Persamaannya membahas peran Dinas Sosial dalam menangani kemiskinan.

¹Heryanti, “Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan: Perspektif Undang Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” *Jurnal Al-Dustur*, vol. 2 no. 2 (Desember 2019), 46.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muslim Sabarisman dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi.” Hasil penelitian membuktikan, bahwa peran dinas sosial Sukabumi dalam penanggulangan kemiskinan belum mencapai tujuan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum mendukung, koordinasi masih lemah, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program masih terbatas. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada dinas sosial untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas program dengan instansi terkait di daerah, meningkatkan intensitas konsultasi dengan instansi sosial provinsi dan pusat.²

Perbedaannya penelitian Muslim Sabarisman dilakukan di Kota Sukabumi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Palu. Persamaannya ialah sama-sama berfokus pada peran Dinas Sosial dalam menanggulangi Kemiskinan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar Hakim Drajat dan Septa Ekasari dengan judul “Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar).” Hasil penelitian menunjukkan efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dapat dikatakan efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dilihat dari beberapa indikator efektivitas, tetapi masih terdapat beberapa kendala diantaranya kehilangan ATM, pemahaman sosialisasi yang masih kurang diterima, terjadinya selisih paham antar stakeholder serta medan yang sulit..³

²Muslim Sabarisman, “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskainan di Kota Sukabumi,” *SOSIO KONSEPSIA*, vol. 4 no. 03 (Mei-Agustus 2015), 194.

³Anwar Hakim Drajat dan Septa Ekasari, “Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar,” *JURNAL TRANSLITERA*, vol. 10. no 1 (2001), 8.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Anwar Hakim Drajat dan Septa Ekasari berfokus pada penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta objek penelitian pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran Dinas Sosial secara umum dalam menanggulangi angka kemiskinan serta penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kota Palu.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Aldino Putra dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat di Kota Palu (Studi tentang Kelompok Usaha Bersama). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial KUBE pada masyarakat di Kota Palu belum berjalan secara efektif dan maksimal, karena ada beberapa aspek yang tidak berjalan secara efektif yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab dan wewenang Dinas Sosial Kota Palu sebagai pelaksana program⁴

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Agung Aldino Putra berfokus pada pelaksanaan program bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palu secara khusus membahas KUBE saja dengan mengukur tingkat keefektivitasannya. Sedangkan penelitian ini membahas tentang peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan tidak hanya melalui program KUBE saja, melainkan secara umum melalui program-program bantuan sosial lainnya.

B. Konsep Peran

⁴Agung Aldino Putra, “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial pada Masyarakat di Kota Palu (Studi tentang Kelompok Usaha Bersama),” *Katalogis*, vol. 6 no. 8 (Agustus 2018), 5.

Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial.⁵

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.⁶

Peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.⁷

Adapun pembagian pembagian peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

⁵Dasril Arifin, "Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak: Studi Kasus di Kecamatan Sei Mandau" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2013), 19

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 221.

⁷Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 04. no. 048 (2017), 2.

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.⁸

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.⁹

C. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan

⁸Ibid., 2.

⁹Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 04. no. 048 (2017), 3.

didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty treshold*).¹⁰

2. Teori Kemiskinan

Kerbo mengidentifikasi ada empat macam teori kemiskinan.¹¹

a) Teori sosial Darwinian.

Teori ini kali pertama muncul dalam sosiologi dan mencoba menjelaskan kemiskinan dalam pengertian perilaku dan sikap orang miskin sendiri. Orang miskin itu miskin karena mereka tidak bekerja keras, mereka mempergunakan uang untuk berjudi, mabuk-mabukan dan kemewahan yang tidak dibutuhkan dan mereka juga memiliki kehidupan keluarga yang kacau balau. Mereka tidak memiliki ambisi, tidak mempunyai panggilan batin untuk bekerja, fatalistik dan menderita karena kurang pendidikan.

b) Budaya Kemiskinan

Budaya kemiskinan merupakan sindrom khusus yang tumbuh dalam beberapa situasi. Budaya ini menghendaki suatu setting ekonomi tunai, yakni tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran, upah rendah dan warga dengan keterampilan rendah. Ketiadaan dukungan lembaga-lembaga

¹⁰Dasril Arifin, "Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak: Studi Kasus di Kecamatan Sei Mandau" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2013), 22

¹¹Zakiyuddin Baidhawiy, *Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal* (Salatiga: LP2M-Press, 2015), 57.

volunter atau negara dan keluarga yang stabil, penduduk berpendapatan rendah cenderung mengembangkan budaya kemiskinan untuk menentang ideologi akumulasi yang dominan di kalangan kelas menengah. Orang miskin menyatakan bahwa mereka memiliki posisi marjinal di dalam masyarakat kapitalistik yang terstrata dan individualistik, yang tidak menawarkan apa pun buat mereka prospek untuk mobilitas ke atas. Agar bertahan hidup, mereka harus mengembangkan lembaga lembaga dan agensi-agensi mereka sendiri karena masyarakat luas cenderung mengabaikan dan meninggalkan mereka. Jadi, orang miskin berupaya membentuk seperangkat nilai, norma, pola perilaku tersendiri yang berbeda dengan budaya umumnya.¹²

c) Teori Kemiskinan Situasional

Teori ini berkeyakinan bahwa orang miskin berperilaku berbeda karena mereka tidak memiliki sumber daya dan kesempatan untuk meniru gaya hidup kelas menengah. Orang-orang muda memiliki sedikit kesempatan untuk pergi ke perguruan tinggi dan mereka banyak putus sekolah. Perempuan lebih memilih keluarga matrifocal karena membolehkan mereka untuk mengklaim atas anak-anak mereka. Teori ini menekankan pentingnya kondisi structural yang menghasilkan kemiskinan, namun teori ini juga cenderung fokus pada respon individu terhadap situasi objektif kemiskinan. Teori ini secara fundamental berbeda dengan teori budaya kemiskinan. Teori ini tidak berasumsi tentang adanya subkultur yang menimbulkan koherensi dan soliditas pada perilaku kaum miskin. Teori situasional menyatakan bahwa individu secara rasional mengikuti pola perilaku yang sesuai dengan situasi

¹²Ibid., 58.

objektif dalam kehidupan mereka. Orang miskin tidak mengikuti nilai-nilai kelas menengah karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Jadi secara praktik, mereka menerima penyimpangan besar dari aspirasi kelas menengah. Inilah yang dijelaskan sebagai “rentang nilai” kelas bawah.¹³

d) Teori Kemiskinan Struktural

Teori ini yakin bahwa kemiskinan disebabkan oleh struktur tatanan sosio ekonomi lebih luas. Yaitu struktur makro masyarakat yang melahirkan kesenjangan dan kemiskinan sebagai akibatnya.¹⁴

Menurut Gunawan Sumodiningrat kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian yaitu : Pertama kemiskinan absolut yaitu apabila pendapatan seseorang tidak mencukupi dari kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Rendahnya tingkat pendapatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana fisik serta kelangkaan modal atau miskin karena sebab alami (*natural*). Kedua Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang (disebabkan oleh faktor budaya) tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya. Ketiga kemiskinan relatif yaitu erat kaitannya dengan masalah pembangunan yang sifatnya struktural. Yakni kebijaksanaan pembangunan yang belum seimbang menyebabkan ketimpangan pendapatan.¹⁵

¹³Ibid., 59-60.

¹⁴Ibid.

¹⁵Itang, “Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan,” Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, vol. 16. no. 1 (Januari-Juni 2015), 2-3.

Beberapa kategori miskin seperti yang dikemukakan oleh Sri Mulyani adalah tidak terpenuhinya kalori sebanyak 2300 grm perhari yang di konsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut para ulama, yaitu: Madzhab Hanafi kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki suatu apapun, sehingga terdorong untuk memintaminta bahan makanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Madzhab Maliki kategori miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Madzhab Hambali kategori miskin adalah orang yang dapat memperoleh separuh kecukupannya atau lebih. Madzhab Syafi'i kategori miskin adalah orang yang memiliki separuh dari kebutuhan dan yang separuh lagi dipenuhi dengan zakat.¹⁶

3. Jenis Kemiskinan

Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat tersebut. Meskipun seseorang/ masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya.¹⁷

¹⁶Ibid., 4.

¹⁷Dasril Arifin, "Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak: Studi Kasus di Kecamatan Sei Mandau" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2013), 29.

Kemiskinan dapat dibagi berdasarkan pola waktu. Menurut pola waktu tersebut kemiskinan dapat dibagi menjadi: (1) *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi. (2) *Cyclical poverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.¹⁸

4. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor ekstern dan intern.¹⁹

a. *Faktor internal*

- 1) Sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya.
- 2) Pengalaman dan pengamatan. Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang

¹⁸Ibid., 28-29.

¹⁹Itang, "Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan," Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, vol. 16. no. 1 (Januari-Juni 2015), 8-9.

akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek.

- 3) Kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.
- 4) Konsep diri. Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya yang menjadi awal perilaku.
- 5) Motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.
- 6) Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.

b. Faktor eksternal

- 1) Kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam

kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapi individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.

- 2) Keluarga. Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.
- 3) Kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.
- 4) Kebudayaan. Kebudayaan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak.

Beberapa faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan, yaitu:²⁰ pendidikan yang terlampau rendah, malas bekerja keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal dan beban keluarga

5. Dampak Kemiskinan

Kemiskinan pada akibatnya memiliki dampak bagi yang menyandangnya, beberapa dampak atau akibat dari kemiskinan, di antaranya:²¹

1) Pengangguran

Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih masyarakat, maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan kebutuhan sulit, kekurangan nutrisi dan kesehatan, dan tak dapat memenuhi kebutuhan penting lainnya. Misalnya saja harga beras yang semakin meningkat, orang yang pengangguran sulit untuk membeli beras, maka mereka makan seadanya. Seorang pengangguran yang tak dapat memberikan makan kepada anaknya akan menjadi dampak yang buruk bagi masa depan sehingga akan mendapat kesulitan untuk waktu yang lama.

Pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti:

²⁰Itang, "Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan," Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, vol. 16. no. 1 (Januari-Juni 2015), 12-13

²¹Ibid., 5.

- a. Pendapatan nasional Riil (nyata) yang dicapai oleh masyarakat lebih rendah dari pada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Sehingga kemakmuran yang dicapai masyarakat pun lebih rendah.
- b. Pengangguran menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
- c. Tingkat kemakmuran yang dapat dinikmati masyarakat lebih rendah daripada tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- d. Berkurangnya investor untuk melakukan perluasan dan pendirian industri baru. Sehingga, tingkat investasi turun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak meningkat.
- e. Menambah beban pengeluaran negara.
- f. Menimbulkan ketidakstabilan politik
- g. Jumlah penduduk miskin semakin bertambah yang berarti beban pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan kian terasa berat.
- h. Dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan perselisihan dalam keluarga.

2) Kriminalitas

Kriminalitas merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri sehingga mencari jalan cepat tanpa memedulikan halal atau haramnya uang sebagai alat tukar guna memenuhi kebutuhan. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, pembegalan, penjambretan dan masih banyak lagi contoh kriminalitas yang bersumber dari kemiskinan. Mereka melakukan itu semua karena kondisi yang sulit mencari penghasilan untuk keberlangsungan hidup

dan lupa akan nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan. Di era global dan materialism seperti sekarang ini tak heran jika kriminalitas terjadi dimanapun.

3) Putusnya Sekolah

Putusnya sekolah dan kesempatan pendidikan sudah pasti merupakan dampak kemiskinan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan rakyat miskin putus sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau cita-cita dan mimpi mereka. Ini menyebabkan kemiskinan yang dalam karena hilangnya kesempatan untuk bersaing dengan global dan hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.

4) Kesehatan

Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat kemiskinan membuat rakyat miskin sulit menjaga kesehatannya. Belum lagi biaya pengobatan yang mahal di klinik atau rumah sakit yang tidak dapat dijangkau masyarakat miskin. Ini menyebabkan gizi buruk atau banyaknya penyakit yang menyebar.

5) Buruknya Generais Penerus

Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada anak-anak itu sendiri seperti gangguan pada perkembangan mental, fisik dan cara berfikir mereka.

6. Kemiskinan dalam Islam

Kemiskinan dalam Islam adalah suatu keadaan dimana manusia yang sangat butuh karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan hidup yang dijelaskan disini adalah dalam rangka memelihara Agama, Kesehatan Jasmani (Jiwa), Intelektualitas dan Pengetahuan (Akal), Keturunan dan Harta.²²

Dalam kitab Ihya Ulum ad-Din, Al-Ghazali berkata:²³

“Orang miskin tidak memiliki kecukupan dalam menuntut ilmu dan kesempurnaan usahanya sama seperti orang pergi ke “bajja” tanpa membawa senjata. Bagaimana tidak demikian, sedangkan orang yang tiada berharta akan menjadi orang yang menggunakan seluruh waktu hidupnya sekedar untuk mencari makan, mendapatkan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Kemudian dia akan menghadapi berbagai macam rintangan yang dapat melalaikan dirinya dari berdzikir dan berfikir. Semua itu tidak bisa dicegah kecuali bersenjatakan harta.”

Terkait dengan definisi miskin dalam Islam, dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alih wasallam bersabda, yang artinya:²⁴

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah ,menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, ia berkata; telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abu Namir bahwa Atha bin Yasar dan Abdurrahman bin Abu Amrah Al-Anshari keduanya berkata; Kami mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata; Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda;

²²Muhammad Iqbal, “Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Islam,” Jurnal Ilmiah.

²³Bayu Tri cahya, “Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”, Jurnal Penelitian, vol. 9, no. 1 (Februari 2015), 43.

²⁴Ibid., 49.

“Orang yang miskin bukanlah orang yang cukup dengan satu atau dua buah kurma, atau sesuap atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta dan menunjukkan kemiskinannya kepada orang lain. Jika kalian mau, bacalah firman Allah; “mereka tidak meminta-minta kepada orang lain.” (H.R. Al-Bukhari).

Masih melalui jalur riwayat yang sama seperti hadits sebelumnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:²⁵

“Bukanlah orang yang miskin itu orang yang selalu keliling kepada manusia, ia tertolak untuk mendapat satu atau dua suap, satu kurma atau dua kurma, tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak mendapat sesuatu untuk mencukupinya, ia malu untuk meminta-minta kepada manusia, dan tidak ada orang yang tahu sehingga bisa bersedekah kepadanya.”

Dalam mendefinisikan makna kemiskinan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam membedakan antara fakir dan miskin. Setelah dilakukan pembahasan mengenai ayat-ayat Al-Qur’an tentang kemiskinan, terlepas dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama, dapat disimpulkan bahwa antara fakir dan miskin persamaan, persamaan keduanya adalah sama-sama sebagai pihak yang memerlukan bantuan untuk mengentaskan diri dari kepapaan.²⁶

7. Kriteria Kemiskinan.

²⁵Bayu Tri cahya, “Kemiskinan Ditinjau dari Perspektif Al-Qur’an dan Hadits”, Jurnal Penelitian, vol. 9, no. 1 (Februari 2015), 43.

²⁶Muhammad Iqbal, “Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Islam,” Jurnal Ilmiah.

Menurut standar Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikatakan masyarakat miskin jika dalam Rumah Tangga itu setidaknya memenuhi 9 kriteria dari 14 kriteria miskin sebagai berikut:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok ranpa diplester
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain
- 5) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
- 6) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- 8) Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- 10) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
- 11) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD

14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Demikianlah beberapa kategori atau kriteria fakir miskin menurut Keputusan Mensos No 146 Tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2013 oleh Menteri Sosial pada saat itu Bapak Salim Segaf Al Jufri.²⁷

²⁷AR-RAHMAN, Kategori atau Kriteria Fakir Miskin Menurut Keputusan Menteri Sosial. <https://www.berbagidesa.com/2021/09/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-kemensos.html?m=1>, diakses tanggal 3 Januari pukul 08.00.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian sehingga penulis dapat memperoleh data yang akurat.

Berdasarkan sifatnya maka jenis penelitian ini yaitu berusaha memberikan secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu di samping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, karena penulis menganggap bahwa metode ini merupakan cara bertatapan langsung dengan informan yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka, cukup dengan observasi, wawancara, dan teknik mengumpulkan data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Sosial Kota Palu yang berada di Jalan Bantilan Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Provinsi Sulawesi Tengah, peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dikarenakan mudah dijangkau peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan skripsi ini.

C. Kehadiran Peneliti

Pada bagian ini peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti diketahui oleh objek peneliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari lokasi penelitian.

Kehadiran peneliti dalam lapangan membutuhkan waktu kurang satu bulan untuk memberikan informasi dan data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan akan memerlukan waktu tambahan apabila situasi dan kondisi yang tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sebagai instrumen mutlak adanya. Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk bertindak sebagai instrumen peneliti sekaligus pengumpulan data.

D. Data dan Sumber Data

Jika dilihat dari jenisnya, sumber data sebagai data primer dan data skunder:¹

1. Data Primer

Data ini berupa teks asli wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber data penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti secara langsung di lapangan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagai pihak yang berwenang atau bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palu.

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia yang dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini berasal dari data primer yang sudah dikelola oleh peneliti sebelumnya melalui berbagai referensi antara lain buku, jurnal maupun dokumen data yang terkait.

¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam upaya memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data adalah:²

1. Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam tehnik observasi pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan judul.
2. Wawancara (*interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaanya ditunjukkan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.³ Untuk itu peneliti mencari data dan informasi dengan cara lisan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan, serta berhadapan langsung dengan pihak yang terkait dalam kewenangan penanggulangan angka kemiskinan di Kota Palu.
3. Dokumentasi, untuk mencari data-data dan dokumen-dokumen yang berupa catatan dan buku, surat kabar, majalah, kripsi penelitian terdahulu. dan lain sebgainya. Pendekatan metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan penanggulangan angka kemiskinan di Kota Palu.

²M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Yogyakarta: AR Ruzz Media, 2012), 165-199.

³Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

F. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif dan metode deduktif. Penggunaan induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku umum, metode analisa induktif ini digunakan untuk menganalisa data-data yang bersifat khusus yang diperoleh dari hasil penelitian untuk memberikan penilaian atau kesimpulan yang berlaku umum terhadap pendapatan pedagang dalam peningkatan ekonomi. Sedangkan penggunaan analisa deduktif lebih menekankan mengenai masalah dari teori-teori umum atau yang berhubungan dengan permasalahan peneliti, baru dikumpulkan dengan spesifik.

Dalam skripsi ini data yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Mereduksi data berarti merangkum permasalahan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses penyajian data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Terkadang penulis menyajikan data yang didapatkan setelah dilakukan reduksi data untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verivication*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kreabilitas data yang diperoleh untuk melengkapi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang relevan terhadap data yang terkumpul, maka penulis menggunakan teknik triangulasi yaitu, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu dengan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.⁴

⁴Nasution, "Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif," (Bandung: Grasindo, 1996), 116.

Triangulasi juga merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sumber informasi dan teknik-teknik. Misalnya, hasil observasi dapat dicek dengan hasil wawancara atau membaca laporan, serta melihat yang lebih tajam hubungan antara beberapa data yang bersifat inkonsisten dapat dihindari. Dengan melakukan tahapan seperti di atas, maka data yang diperoleh dalam karya ilmiah benar-benar adalah data yang dapat dipertanggung jawabkan validitas dan keakuratannya serta memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah penelitian karya ilmiah.

Disamping penulis menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data di atas, maka penulis melakukan perbincangan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat, yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk dirundingkan.

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan dengan tujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan Dosen Pembimbing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palu merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, Kota Palu terletak pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu sehingga wilayahnya terdiri dari lima bentang alam yang berbeda seperti pegunungan, lembah, sungai, teluk, dan lautan. Bentang alam Kota Palu membentang memanjang dari timur ke barat dengan luas wilayah 395,06 km². secara astronomis Kota Palu terletak pada posisi 119,45-121,15 BT dan 0,36-0,56 LS. Kota Palu terletak pada garis khaktulistiwa. Pada tahun 2021, penduduk Kota Palu berjumlah 372.113 jiwa, dengan kepadatan 942 jiwa km².

Wilayah Kota Palu berbatasan dengan Kabupaten Donggala di sebelah timur, utara dan barat, Kabupaten Sigi di sebelah selatan, Kabupaten Sigi di sebelah barat, dan Kabupaten Parigi Moutong di sebelah timur. Terdapat 8 kecamatan di Kota Palu, yaitu:

1. Kecamatan Palu barat, terdiri dari 6 kelurahan : Balaroa, Baru, Kamonji, Lere, Siranindi, Ujuna.
2. Kecamatan Tatanga, terdiri dari 6 kelurahan : Boyaoge, Duyu, Nunu, Palupi, Pengawu, Tawanjuka.
3. Kecamatan Ulujadi, terdiri dari 6 kelurahan : Buluri, Donggala Kodi, Kabonena, Silae, Tipo, Watusampu.
4. Kecamatan Palu Selatan, terdiri dari 5 kelurahan : Birobuli Selatan, Birobuli Utara, Petobo, Tatura Selatan, Tatura Utara.

5. Kecamatan Palu Timur, terdiri dari 5 kelurahan : Besusu Barat, Besusu Tengah, Besusu Timur, Lolu Selatan, Lolu Utara.
6. Kecamatan Mantikulore, terdiri dari 8 kelurahan : Kawatuna, Lasoani, Layana Indah, Poboya, Talise, Talise Valanguni, Tanamodindi, Tondo.
7. Kecamatan Palu Utara, terdiri dari 5 kelurahan : Lambara, Kayumalue Pajeko, Mamboro, Mamboro Barat, Taipa.
8. Kecamatan Tawaeli, terdiri dari 5 kelurahan : Baiya, Lambara, Panau, Pantoloan Induk, Pantoloan Boya.

Masyarakat Kota Palu sangat heterogen. Penduduk yang menetap di kota ini berasal dari berbagai suku bangsa seperti Bugis, Toraja dan Mandar yang berasal dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, suku Gorontalo, Manado, Jawa, Arab, Tionghoa, dan suku Kaili yang merupakan suku asli dan terbesar di Sulawesi Tengah.

B. Profil Dinas Sosial Kota Palu

1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kota Palu terletak di Jalan Bantilan No. 25, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.

Berdasarkan aturan normatif bahwa kedudukan Dinas Sosial Kota Palu dibentuk berdasarkan peraturan walikota Nomor 12 tahun 2017 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial.¹

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

¹Dokumen Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu

Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial Kota Palu menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :²

²Dokumen Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan sosial, serta pemberdayaan sosial.
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengumpulan data, menyusun rencana dan program dibidang partisipasi masyarakat rehabilitasi sosial, pelayanan sosial, dan pemberdayaan sosial,
3. Pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang partisipasi masyarakat, rehabilitasi pelayanan sosial, dan pemberdayaan adat sosial.
4. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tata laksana.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palu adalah sebagai berikut :

- a. Visi : Tanggap, Sejahtera dan Mandiri
- b. Misi
 - 1) Meningkatkan akseibilitas pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
 - 2) Mengembangkan kapasitas kelembagaan sosial, adat, budaya, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan sosial menuju kemandirian masyarakat.
 - 3) Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi, pelaporan kinerja dan keuangan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu No. 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Palu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Program
- c. Bidang Penanganan Fkir Miskin dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Penanganan Fakir Miskin
 - 2) Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga
 - 3) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - 1) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Sosial
 - 2) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 3) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
- e. Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Perdagangan Orang
 - 3) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Daya Sosial

f. Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat

- 1) Seksi Kelembagaan Masyarakat
- 2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat
- 3) Seksi Partisipasi Masyarakat

g. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Tugas Pokok

a. Kepala dinas

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan bidang sosial;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan penyiapan bahan pembinaan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Sekretaris Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi meliputi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan rencana kerja pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
 - 2) Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pengelolaan kepegawaian dan umum, keuangan dan asset, serta perencanaan dan program;
 - 3) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional, pelayanan administrasi, keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - 4) Penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - 5) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan ; dan
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas, meliputi :
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
 - 2) Melaksanakan urusan surat-menyurat dokumentasi dan kearsipan;
 - 3) Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan,kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor;
 - 4) Melaksanakan penyusunan bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pegawai,kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai,menyiapkan bahan mengikuti pendidikan pelatihan, dan ujian dinas;

- 6) Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat- rapat dinas;
 - 7) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- d. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas, meliputi:
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan asset;
 - 2) Melaksanakan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, akuntansi, pembukuan keuangan, dan pelaporan keuangan, serta penyusunan bahan tanggapan pemeriksaan;
 - 3) Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi pertanggung-jawaban keuangan;
 - 4) Melaksanakan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - 6) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 7) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantorserta pengadaan, penyimpanan, pendistribusian serta inventarisasi;
 - 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- e. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas, meliputi:
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2) Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan program kerja;
 - 3) Melaksanakan penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - 5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 - 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial
- Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan data, bahan, dan informasi, advokasi dan fasilitasi pengelolaan Penangananfakir miskin, jaminan sosial dan keluarga serta Penanganan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial;
 - 2) Penyiapan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis operasional di bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial;
 - 3) Penyiapan pengoordinasian penanganan fakir miskin dan jaminan sosial;
 - 4) Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial, operasional Jaminan Sosial dan Keluarga;
 - 5) Penyiapan bahan pengembangan dan pemberdayagunaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna (KT), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
 - 6) Penyiapan bahan pembinaan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan di bidang penanganan fakir miskin dan jaminan sosial;
 - 7) Penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang menyiapkan bahan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas, meliputi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatanseksi Penanganan Fakir Miskin
 - 3) Melaksanakan menyiapkan bahan kebijakan dan pembinaan teknis penanganan fakir miskin;
 - 4) Melaksanakan menyiapkan bahan kerjasama lembaga non pemerintah;
 - 5) Melaksanakan menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi penanganan fakir miskin;
 - 6) Melaksanan penyediaan sarana dan prasarana sosial bagi fakir miskin;
 - 7) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang menyiapkan bahan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- h. Seksi Jaminan Sosial dan Keluargamempunyai tugas, meliputi :
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga;
 - 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang jaminan sosial dan keluarga;
 - 3) Melaksanakan pengelolaanadministrasiprogram dan kegiatan SeksiJaminan Sosial dan Keluarga;

- 4) Melaksanakan penyusunan rencana dan penempatan kinerja jaminan sosial dan keluarga;
 - 5) Melaksanakan bimbingan dan pelayanan sosial;
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi bantuan sosial, operasional jaminan sosial dan keluarga;
 - 7) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- i. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas, meliputi:
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - 4) Melaksanakan penyusunan penyiapan bahan dalam rangka penyiapan bahan pembinaan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - 5) Melaksanakan penyusunan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian dibidang peran Keluarga bermasalah sosial psikologis;

- 6) Menyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
 - 7) Melaksanakan pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Organisasi Sosial (ORSOS) dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM);
 - 8) Melaksanakan penyusunan menyiapkan bahan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha;
 - 9) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 10) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; dan
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- j. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan bahan, dan informasi, advokasi dan fasilitasi pengelolaan Pelayanan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, pelayanan rehabilitasi sosial anak dan Lansia serta rehabilitasi sosial dan napsa. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan penyiapan penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 2) Penyiapan penyusunan perencanaan teknis operasional bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;

- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - 4) Penyiapan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan Lanjut Usia (Lansia), pelayanan dan rehabilitasi Sosial tuna sosial korban perdagangan orang dan napza, pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
 - 5) Penyiapan pelaksanaan monitoring pelayanan sosial tuna sosial korban perdagangan orang dan napza, pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas;
 - 6) Penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; dan
 - 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- k. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas, meliputi:
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

- 4) Melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - 5) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - 6) Melaksanakan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penempatan akreditasi dan sertifikasi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - 7) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
1. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas, meliputi:
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia (Lansia);
 - 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan rehabilitasi sosial anak dan Lanjut Usia (Lansia);
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan Lansia
 - 4) Melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;

- 5) Melaksanakan penyusunan program kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dengan unit terkait;
 - 6) Melaksanakan koordinasi, Sinkronisasi, harmonisasi dan kerjasama pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - 7) melaksanakan pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - 8) Melaksanakan bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi program pelayanan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - 9) Melaksanakan menyiapkan bahan pelayanan sosial anak, balita rehabilitasi sosial anak nakal dan anak terlantar serta lanjut usia terlantar;
 - 10) Melaksanakan penyiapan bahan perizinan pengangkatan anak antar WNI;
 - 11) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 12) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia; dan
 - 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- m. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa) mempunyai tugas, meliputi:
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa);

- 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi tuna sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa);
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan rehabilitasi tuna sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa);
- 4) Melaksanakan kegiatan teknis pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa);
- 5) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa);
- 6) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif lainnya (Napsa); dan
- 8) Menyiapkan bahantugas lain yang diberikan atasan.

n. Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan data, bahan, dan informasi, advokasi dan fasilitasi pengelolaan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial bencana dan korban perdagangan orang serta pelestarian nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial.

Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi meliputi :

- 1) Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat;
 - 2) Penyiapan penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis operasional bidang advokasi pengelolaan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial bencana dan korban perdagangan orang serta pelestarian nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial ;
 - 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis advokasi dan fasilitasi pengelolaan perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial bencana dan korban perdagangan orang serta pelestarian nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial.;
 - 4) Penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelaporan kinerja Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- o. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas, meliputi:
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;

- 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam;
 - 4) Melaksanakan menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan korban bencana;
 - 5) Melaksanakan menyiapkan peta rawan bencana alam sebagai bahan penyusunan data dan informasi tentang perlindungan sosial korban bencana alam;
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan masyarakat korban bencana pada aspek perlindungan dan pemulihan melalui kegiatan dukungan psikososial dan advokasi sosial;
 - 7) Melaksanakan pengembangan masyarakat korban bencana pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ketahanan sosial;
 - 8) Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian program perlindungan sosial korban bencana alam berbentuk pedoman petunjuk operasional (juknis/juklak) dan keputusan-keputusan;
 - 9) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 10) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; dan
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- p. Seksi Perlindungan Sosial Korban, Bencana Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas, meliputi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Korban Perdagangan Orang;
 - 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial dan korban perdagangan orang;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial dan korban perdagangan orang;
 - 4) Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan perlindungan sosial korban bencana sosial dan korban perdagangan orang;
 - 5) Melaksanakan penyiapan peta rawan bencana sosial;
 - 6) Melaksanakan kegiatan pencegahan mitigasi dan deteksi dini bencana sosial untuk penanganannya dan meminimalisir dampak akibat bencana sosial;
 - 7) Melaksanakan pengembangan potensi sosial kemasyarakatan dalam rangka perlindungan sosial;
 - 8) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 9) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- q. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pendaaygunaan Sumber Dana Sosial (PSDS) mempunyai tugas, meliputi:

- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial;
- 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelestarian nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial;
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan pelestarian nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelestarian dan pengembangan nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial dan pendayagunaan sumber dana sosial;
- 5) Melaksanakan penyiapan rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar pahlawan nasional dan pengangkatan gelar perintis kemerdekaan, usulan janda pahlawan dan perintis kemerdekaan;
- 6) Melaksanakan peringatan hari-hari pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN);
- 7) Melaksanakan pengusulan rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial;
- 8) Melaksanakan pemberian rekomendasi dan pengendalian pengumpulan uang atau barang dan pelaksanaan izin undian tingkat Kota;
- 9) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 10) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

r. Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan bahan dan informasi di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan adat dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi meliputi :

- 1) Penyiapan penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat;
- 2) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan adat dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan kelembagaan adat dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- 4) Penyiapan pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di bidang pemberdayaan sosial masyarakat;
- 5) Penyiapan bahan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 6) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- s. Seksi Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas, meliputi:
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi kelembagaan;
 - 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang kelembagaan masyarakat;
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan pada Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - 4) Melaksanakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - 5) Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan pembinaan menyusun data profil kelurahan di bidang kelembagaan masyarakat;
 - 6) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), karang taruna, tim penggerak Penyiapan bahan pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Keluarga (RT), Rukun Warga (RW), penguatan Badan Kesuasebadaan Masyarakat (BKM), dan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) remaja masjid dan perkumpulan kemasyarakatan lainnya;
 - 7) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;

- 8) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 9) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Kelembagaan Masyarakat; dan
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- t. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat mempunyai tugas, meliputi:
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Adat;
 - 3) Menyiapkan bahan kebijakan teknis pemberdayaan adat dan kemandirian kehidupan sosial budayamasyarakat;
 - 4) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembentukan dewan adat;
 - 5) Melaksanakan penyiapan bahan inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
 - 6) Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi asset kekayaan budaya dan peninggalan budaya daerah;
 - 7) Melaksanakan sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat;
 - 8) Penyiapan bahan penetapan pedoman teknis pemberdayaan adat dan pemandirian kehidupan sosial budaya masyarakat;

- 9) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 10) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemberdayaan kelembagaan Adat; dan
 - 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- u. Seksi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas, meliputi:
- 1) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Partisipasi Masyarakat;
 - 2) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang partisipasi masyarakat
 - 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi program dan kegiatan Seksi Partisipasi Masyarakat;
 - 4) Melaksanakan penyusunan rencana pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - 5) Melaksanakan fasilitasi lomba kelurahan;
 - 6) Melaksanakan fasilitasi Lomba Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (*P2WKSS*);
 - 7) Melaksanakan menyiapkan bahan pendampingan program pemberdayaan masyarakat;
 - 8) Melaksanakan pelatihan manajemen pembangunan partisipatif;

- 9) Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Partisipasi Masyarakat; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Keadaan Kemiskinan di Kota Palu

Secara umum, jumlah penduduk miskin di Kota Palu terhitung paling rendah dibanding 13 kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun dalam perkembangannya, mengalami fluktuasi seiring dengan perkembangan dinamika jumlah penduduk dan persoalan sosial lainnya. Data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan angka kemiskinan di Kota Palu dengan kisaran angka 26.890 jiwa setara dengan 6,80 %, tahun 2021 berkisaran angka 28.600 jiwa setara dengan 7,17 % atau terdapat penambahan penduduk miskin sebesar 1710 jiwa. Pada tahun 2022 mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 26.750 jiwa setara dengan 6,63 % atau mengalami pengurangan penduduk miskin sebesar 1850 jiwa.

Dari jumlah penduduk miskin tahun 2020-2022 tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1

Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Sulawesi Tengah	12,92	13,00	12,33
Banggai Kepulauan	14,04	13,72	13,44

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Banggai	7,39	7,83	7,33
Morowali	13,43	13,75	12,58
Poso	15,45	15,92	15,18
Donggala	17,39	16,73	16,30
Tolitoli	12,85	13,51	12,74
Buol	13,93	14,06	12,85
Parigi Moutong	15,85	15,28	14,63
Tojo Una-una	16,39	16,60	16,12
Sigi	12,45	13,05	12,30
Banggai Laut	14,60	14,17	13,17
Morowali Utara	14,10	13,90	12,97
Kota Palu	6,80	7,17	6,63

Tabel 2
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		
	2020	2021	2022
Sulawesi Tengah	398,73	404,44	388,36
Banggai Kepulauan	16,70	16,33	16,07
Banggai	28,16	30,10	28,55
Morowali	16,50	17,07	15,86
Poso	40,20	41,99	40,78
Donggala	53,17	51,23	50,22
Tolitoli	30,51	32,19	30,61
Buol	22,93	23,46	21,84
Parigi Moutong	78,76	76,79	74,60
Tojo Una-una	25,43	25,86	25,33
Sigi	30,00	31,51	29,94
Banggai Laut	11,09	10,92	10,32

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
	2020	2021	2022
Morowali Utara	18,38	18,40	17,49
Kota Palu	26,89	28,60	26,75

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Kota Palu dari tahun ke tahun mengalami perubahan baik pengurangan maupun penambahan jumlah penduduk miskin. Dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, sedangkan di tahun berikutnya yaitu 2022 mengalami penambahan jumlah penduduk miskin.

C. Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa Dinas Sosial Kota Palu dalam upayanya menanggulangi kemiskinan dilakukan dengan melaksanakan program pemberian bantuan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Salsa selaku seksi Penanganan Fakir Miskin bahwa:³

“Kalau Dinas Sosial dalam rangka menanggulangi kemiskinan itu dia melalui program pemberian bantuan sosial. Jadi program yang dikelola Dinas Sosial itu ada empat jenis program. Ada yang namanya program bantuan sosial untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), terus Bantuan Modal Usaha (BMU), kemudian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan peralatan usaha bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”.

1. Upaya Dinas Sosial Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terkait dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Palu, Dinas sosial Kota Palu bersama pemerintah Kota Palu menjalankan program pemberian Bantuan Modal Usaha (BMU), program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan stimulan perumahan

³Bu Salsa, Pegawai Bagian penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu, Wawancara tanggal 6 September 2022 di Kantor Dinas Sosial Kota Palu

swadaya, dan bantuan peralatan usaha bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Pemberian bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat agar lebih sejahterah dan sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada.

a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. KUBE beranggotakan 5 sampai 20 kepala keluarga dari masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DPTFMOTM).

Berikut adalah tahapan pengusulan bantuan sosial KUBE:

- 1) Perorangan, masyarakat, atau lembaga kesejahteraan sosial dapat mengusulkan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui Kepala Desa
- 2) Dinas Sosial Kabupaten/Kotamelakukan verifikasi dan validasi calon penerima KUBE sesuai Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi
- 3) Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengusulkan proposal kepada Menteri Sosial melalui Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan tembusan disampaikan ke Kepala Dinas Sosial Provinsi

- 4) Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I melakukan verifikasi dan validasi atas usulan proposal Dinas Sosial Kabupaten/Kota
- 5) Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I menetapkan lokasi dan penerima KUBE
- 6) Hasil penetapan lokasi dan penerima KUBE disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota
- 7) Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) KUBE

Adapun syarat-syarat KUBE adalah sebagai berikut:

- 1) Rumah Tangga Miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM)
- 2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- 3) Telah menikah dan/atau berusia 18 (Delapan Belas) tahun sampai dengan 60 (Enam Puluh) tahun dan masih produktif
- 4) Belum pernah mendapat bantuan KUBE
- 5) Membentuk kelompok beranggotakan 5 sampai 20 orang yang tinggal berdekatan dan berdomisili tetap
- 6) Mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat

Adapun mekanisme pemberian bantuan sosial KUBE diberikan dalam bentuk non-tunai melalui transfer ke rekening kelompok. Sementara itu, dalam bantuan sosial tersebut ada Pendamping KUBE yaitu seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Dalam keanggotaan KUBE, setiap anggota dari kelompok yang menerima bantuan sosial mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak anggota KUBE adalah sebagai berikut:

- 1) Memilih/dipilih menjadi pengurus
- 2) Mengemukakan pendapat dan gagasan
- 3) Mengelola usaha dan/atau kegiatan
- 4) Mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama
- 5) Menerima keuntungan dari hasil usaha
- 6) Ikut merumuskan aturan/kesepakatan kelompok
- 7) Menerima dana bantuan KUBE sebesar Rp 2.000.000 per KK

Adapun kewajiban anggota KUBE adalah sebagai berikut:

- 1) Mematuhi aturan/kesepakatan kelompok
- 2) Menghadiri dan aktif dalam kegiatan kelompok
- 3) Memanfaatkan bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
- 4) Mengelola Bantuan Sosial UEP-KUBE secara kelompok
- 5) Mengelola iuran kesetiakawanan sosial
- 6) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban KUBE

b. Bantuan Modal Usaha (BMU)

Bantuan Modal Usaha adalah bantuan pemerintah daerah berupa uang untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling

menguntungkan. Seperti yang diutarakan oleh Bu Salsa Pegawai Bagian Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Palu:⁴

“Bantuan Modal Usaha bantuan ini diberikan tunai senilai 10 juta rupiah per keluarga itu tunai, tapi ini diberikan untuk modal usahanya. Jadi kami berikan tunai mereka belanja kami terima nota tapi syaratnya juga agak ketat, dia tidak bisa terima bantuan sosial dari pusat”

Kriteria penerima bantuan Pemerintah Daerah berupa Bantuan Modal Usaha bagi keluarga Fakir Miskin, sebagai berikut:

- 1) Telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif
- 2) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang berdomisili di daerah
- 3) Keluarga fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat
- 4) Mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha
- 5) Memiliki usaha tetap dan/atau belum memiliki usaha tetap

Adapun mekanisme permohonan Bantuan Modal Usaha (BMU) bagi keluarga fakir miskin, sebagai berikut:

- 1) Keluarga fakir miskin mengajukan permohonan Bantuan Modal Usaha (BMU) kepada Walikota melalui Dinas Sosial Kota Palu yang disahkan oleh Lurah
- 2) Dinas Sosial Kota Palu:

⁴Bu Salsa, Pegawai Bagian penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu, Wawancara tanggal 6 September 2022 di Kantor Dinas Sosial Kota Palu

- a. Memverifikasi dan validasi calon keluarga fakir miskin penerima Bantuan Modal Usaha (BMU)
 - b. Membimbing dan mengarahkan usaha yang diminati oleh keluarga fakir miskin
 - c. Mengidentifikasi dan menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana produksi usaha sesuai permohonan yang diajukan oleh keluarga fakir miskin
- 3) Dinas Sosial Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 2, membentuk tim verifikasi dan validasi Bantuan Modal Usaha (BMU) serta membuat jadwal pelaksanaan kegiatan.

Adapun mekanisme pencairan bantuan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pencairan Modal Usaha setelah melalui verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Bantuan Modal Usaha Dinas Sosial Kota Palu
- 2) Mekanisme pencairan modal usaha berpedoman pada peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah
- 3) Pencairan bantuan modal usaha dilakukan melalui mekanisme transfer bank penyalur kepada rekening keluarga fakir miskin penerima bantuan modal usaha dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahap I pencairan bantuan modal usaha sejumlah 30%; dan
 - b. Tahap II pencairan bantuan modal usaha sejumlah 70% dibayarkan berdasarkan laporan progres pembelian sarana dan prasarana perlengkapan pada tahap I

c. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya seperti yang diutarakan oleh Bu Salsa selaku pegawai bagian penanganan fakir miskin Dinas Sosial Kota Palu:⁵

“Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini adalah program irisan antara Dinas Sosial dengan Dinas ee ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim.”

Kontribusi yang dilakukan Dinas Sosial terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tersebut dengan cara memberikan bantuan sosial secara tunai kepada penerima BSPS yang nama-namanya telah masuk sebagai daftar penerima yang telah diSKkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bu Salsa:⁶

“Jadi semua orang-orang yang diSKkan oleh Perkim untuk dibedah rumahnya, maka kami berikan bantuan tunai 2 juta setengah untuk modal usaha, jadi program irisan dari kami dan dari Dinas Perkim. Tapi kami hanya bisa proses semua data-data yang diSKkan oleh Perkim”.

Adapun mekanisme pemberian bantuan tersebut sebagaimana dilanjutkan oleh beliau:⁷

“Adapun mekanismenya, ee jadi kami hanya mengikuti SK yang ada, kami cari kembali orang-orangnya, kami lakukan verifikasi, kami berikan dia bantuan 2 juta setengah, tapi itu baru program di tahun ini”

d. Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah bantuan sosial yang menjadi salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh Pemerintah Kota, yakni dengan memberikan bantuan peralatan usaha kepada pelaku usahan yang memenuhi kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

⁵Bu Salsa, Pegawai Bagian penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu, Wawancara tanggal 6 September 2022 di Kantor Dinas Sosial Kota Palu

⁶Ibid

⁷Bu Salsa, Pegawai Bagian penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu, Wawancara tanggal 6 September 2022 di Kantor Dinas Sosial Kota Palu

Definisi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai Peraturan Menteri Sosial No 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karna suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Adapun jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah sebagai berikut:

1) Anak Balita Terlantar

Adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua atau keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

2) Anak Terlantar

Adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua atau keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga.

3) Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karna melakukan tindak pidana dan anak

yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4) Anak Jalanan

Adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5) Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan dengan disabilitas fisik dan mental.

6) Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

7) Anak yang Memerlukan Kebutuhan Khusus

Adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

8) Lanjut Usia Terlantar

Adalah seseorang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

9) Penyandang Disabilitas

Adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

10) Tuna Susila

Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

11) Gelandangan

Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

12) Pengemis

Adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

13) Pemulung

Adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis

14) Kelompok Minoritas

Adalah kelompok yang mengalami keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial seperti gay, waria, dan lesbian.

15) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

16) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

17) Korban Penyalahgunaan NAPZA

Adalah seseorang yang menggunakan narkitika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

18) Korban Trafficking

Adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19) Korban Tindak Kekerasan

Adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

20) Pekerja Migran Bermasalah Sosial

Adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21) Korban Bencana Alam

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami gunung meletus, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

22) Korban Bencana Sosial

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat.

23) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah, atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

24) Fakir Miskin

Adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan/atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak baginya dan/atau keluarganya.

25) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

26) Komunitas Adat Terpencil

Adalah kelompok sosial budaya yang bersifat local dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Syarat-syarat untuk menerima Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Calon penerima bantuan memenuhi persyaratan sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- 2) Calon penerima bantuan tercatat sebagai masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- 3) Calon penerima bantuan memiliki usaha yang bisa dibantu secara ekonomi
- 4) Calon penerima bantuan membuat proposal

Selanjutnya lebih rinci dijelaskan oleh Bu Salsa terkait bantuan sosial kepada PPKS adalah sebagai berikut:⁸

“Sebenarnya bantuan ini sejenis KUBE, hanya bedanya kalau PPKS ini ee selama dia masuk kategori ee Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial misalkan dia perlu bantuan sosial ekonomi, disabilitas, fakir miskin, janda yang punya anak dan memiliki ekonomi rendah, pokoknya yang kayak-kayak begitu selama dia memenuhi syarat itu bisa kami berikan bantuan alat usaha. Dia sejenis KUBE hanya saja dia bukan berbentuk ee bisa kelompok bisa tidak, iya jadi sesuai dia punya usaha, misalkan dia jual pop ice, jadi dia ajukan proposal dia misalkan minta apa minta apa kami berikan tapi dia berupa alat bukan bahan”.

Setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, Dinas Sosial melakukan verifikasi berkas sesuai dengan persyaratan yang ada untuk selanjutnya dilakukan penyaluran bantuan sosial tersebut.

2. Manfaat yang Dirasakan Oleh Penerima Bantuan Sosial Melalui Program Bantuan Dinas Sosial Kota Palu

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang menerima bantuan sosial, banyak dampak positif yang dirasakan oleh para penerima diantaranya sebagai berikut:

- a) Program bantuan sosial mengatasi kemiskinan masyarakat

⁸Bu Salsa, Pegawai Bagian Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu, Wawancara tanggal 6 September 2022 di Kantor Dinas Sosial Kota Palu

- b) Program bantuan sosial memberikan dampak edukatif, pengalaman serta pengetahuan masyarakat selaku penerima bantuan.
- c) Program bantuan sosial mempengaruhi sikap solidaritas masyarakat sebagai makhluk sosial.

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang menerima bantuan sosial, banyak dampak positif yang dirasakan oleh para penerima khususnya masalah sosial ekonomi yang menjadi langkah penting dalam mengatasi masalah kemiskinan. Manfaat bantuan sosial tersebut diungkapkan oleh para penerima bantuan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Farzan A. Lamahusen penerima bantuan sosial selaku Ketua KUBE Bersatu bahwa:⁹

“Ya dari KUBE ini kami banyak dapat pengetahuan dan membantu kami punya anggota semua dalam hal pengalaman mengembangkan usaha, selain itu kami juga terlatih ya begitulah banyak pengetahuan dan pengalaman dan juga membantu ekonomi semua anggota”.

Hal lain yang senada diungkapkan oleh Bapak Herlan Amri selaku Ketua KUBE Gotong-Royong bahwa:¹⁰

“Banyak skali manfaatnya, dari KUBE ini kami jadi terbantu menjalankan usaha dan mengembangkannya juga membantu skali dalam hubungan sosial masing-masing anggota dari kegiatan-kegiatan dalam kelompok juga bagus membangun masing-masing anggota lebih akrab terlebih lagi dalam masalah ekonomi, Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Amaludin sebagai penerima Bantuan Modal Usaha, beliau mengungkapkan bahwa:¹¹

⁹Bapak Farzan A. Lamahusen, Ketua KUBE Bersatu, Wawancara tanggal 12 September 2022 di Jalan Rantogau Kota Palu.

¹⁰Bapak Herlan Amri, Ketua KUBE Gotong-Royong, Wawancara tanggal 12 September 2022 di Jalan Tamako Kota Palu.

¹¹Bapak Amaludin, Penerima Bantuan Modal Usaha, Wawancara tanggal 15 september 2022 di Jalan Salambara Kota Palu

“Dengan adanya bantuan dari Pemerintah ini sangat membantu keluarga kami untuk memulai usaha, yang saya rasakan dampaknya sangat besar karna kami bisa memulai membuka usaha”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Rosnani selaku penerima Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, beliau mengatakan bahwa:¹²

“Yang saya rasakan setelah adanya bantuan dari pemerintah ya usaha saya lebih memudahkan untuk memenuhi perlengkapan usaha jualan pop ice saya, jadi saya itu bisa lebih terbantu karna bisa melengkapi peralatan jualan saya jadi lebih mudah untuk saya terus berjualan, ee hasil dari penjualan saya juga bisa saya pakai untuk belanja keperluan lain untuk jualan”

Dengan adanya bantuan sosial dari Pemerintah Kota Palu bersama dengan Dinas Sosial Kota Palu masyarakat dapat lebih mandiri baik dalam memulai atau mengembangkan usaha. Selain itu, program bantuan sosial tersebut memberikan dampak positif tidak hanya dalam mengatasi kemiskinan namun juga memberikan pengetahuan serta edukasi kepada masyarakat baik dalam melakukan pengembangan usaha juga dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial.

Dengan adanya Program Bantuan Sosial seperti Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Modal Usaha (BMU), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya serta Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial tersebut diharapkan dapat menjadi sebab bagi masyarakat menuju kesejahteraan sebagaimana yang menjadi tujuan dari program pemerintah tersebut yaitu mengatasi ataupun menanggulangi masalah kemiskinan serta kesejahteraan bagi masyarakat.

¹²Ibu Rosnani, Penerima Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Wawancara tanggal 2 Novenber 2022 di Jalan Thalua Konchi Kota Palu.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Sosial Kota Palu dalam Menjalankan Program Bantuan sosial

Dalam menjalankan program, ada beberapa faktor pendukung yang membantu berjalannya program dengan baik. Adapun faktor-faktor pendukung berjalannya program bantuan sosial adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1) Minat Masyarakat Mengikuti Program Bantuan Sosial

Dengan adanya bantuan sosial oleh Pemerintah Kota, masyarakat lebih terbantu dalam mengatasi masalah sosial ekonomi sehingga menyebabkan antusias bagi masyarakat dalam mengikuti program bantuan sosial oleh pemerintah, hal ini juga memudahkan bagi pemerintah dalam melakukan pendataan bagi calon penerima bantuan karena masyarakat mengajukan diri secara langsung melalui pengajuan proposal untuk penerimaan bantuan.

2) Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pengelolaan Bantuan Sosial

Dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan sebagian besar penerima bantuan lebih mengoptimalkan bantuan tersebut dalam bentuk upaya pengembangan usaha mereka. Sehingga menjadi sebab masyarakat penerima bantuan bisa lebih mandiri.

Seperti yang diungkapkan oleh Bu Salsa selaku Pegawai Bagian Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Palu, bahwa:¹³

¹³Bu Salsa, Pegawai Bagian Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu, Wawancara tanggal 6 September 2022 di Kantor Dinas Sosial Kota Palu

“Setelah melakukan pemberian bantuan kepada para penerima Bansos kami juga melakukan monitoring setahun sekali, ee ini bertujuan untuk mengetahui siapa-siapa saja atau kelompok mana saja yang menerima bantuan yang sudah masuk berhasil mandiri. Jika dalam setahun misalkan si penerima bantuan masih berhasil mempertahankan usaha mereka, maka itu sudah masuk dalam kategori mandiri, sehingga dana bantuan sosial berikutnya bisa dialokasikan bagi para penerima baru yang berhak ee yang tentunya sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial”

Selain faktor pendukung diatas, beberapa faktor pendukung lain juga berpengaruh jalannya program bantuan sosial seperti bagi penerima bantuan sosial yang berperan aktif dalam setiap kegiatan, adanya kerjasama dan dukungan dari tokoh masyarakat, minat masyarakat untuk berkembang tinggi, sumber daya alam, adanya hubungan baik antar anggota penerima bantuan sosial serta interaksi yang baik dari semua pihak terkait.

b. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat berjalannya program bantuan sosial seperti yang diutarakan oleh Bapak Sarfan Da’a selaku Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu sebagai berikut:¹⁴

“Ee,, sebenarnya kalau kita perhatikan lebih seksama salah satu faktor penghambat berjalannya bantuan sosial dengan baik itu malah berasal dari dalam Dinas Sosial itu sendiri. Ee misalkan sebagai tim pendata yang

¹⁴Bapak Sarfan Da’a, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu, Wawancara tanggal 6 September 2022 di Kantor Dinas Sosial Kota Palu.

bertugas melakukan pendataan itu biasanya tidak sportif, ee tidak professional lah istilahnya, masih ada yang curang misalnya saja dengan memasukkan kerabat atau orang-orang terdekat mereka sebagai calon penerima bantuan, ya walaupun sebenarnya tidak layak secara persyaratan”

Hal senada juga diutarakan oleh Bu Salsa selaku Pegawai seksi penanganan fakir miskin, bahwa:¹⁵

“Ya sebenarnya kalau bicara tentang penghambat berjalannya program itu biasanya berasal dari panitia yang bertugas mendata calon penerima. Mengapa saya katakan menjadi penghambat, karena biasanya terjadi kecurangan dalam pendataan, terkadang banyak data penerima yang menumpuk namun setelah kami melakukan verifikasi sebagian tidak memenuhi persyaratan sebagai calon penerima”.

Selain faktor penghambat di atas, faktor lainnya yang menjadi penghambat berjalannya program dengan baik juga berasal dari sisi para penerima bantuan. Misalnya seperti para penerima bantuan KUBE, tidak solidnya anggota kelompok terkadang menjadi kendala berjalannya kegiatan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Farzan A. Lamahusen selaku Ketua KUBE Bersatu bahwa:¹⁶

“Kalau masalah penghambat dari kelompok kami sih biasanya terkendala waktu dari masing-masing anggota, biasanya saat mau kegiatan ada kendala urusan diluar atau biasa juga ada acara dan banyak lagi. Jadi

¹⁵Bu Salsa, Pegawai Bagian Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palu, Wawancara tanggal 6 September 2022 di Kantor Dinas Sosial Kota Palu

¹⁶Bapak Farzan A. Lamahusen, Ketua KUBE Bersatu, Wawancara tanggal 12 September 2022 di Jalan Rantogau Kota Palu.

terkadang susah untuk komunikasi itu, cuma kalau dari kami tetap bisa mengantisipasi ya intinya dari tata cara bicara saja dengan anggota selalu diusahakan nyaman dan baik”

Selain itu, sebagian masyarakat yang telah menerima bantuan sosial masih belum mampu mengelola bantuan yang telah diberikan secara optimal, sehingga belum tercapainya kemandirian bagi penerima bantuan sehingga berpengaruh pada keberhasilan dalam mengatasi kemiskinan.

Dalam mengatasi masalah kemiskinan, setiap aktifitas baik lembaga pemerintah maupun masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan yang mengikatnya, salah satunya yaitu pedoman dalam agama. Islam adalah agama yang hadir dan mengatur setiap aktifitas manusia tidak terkecuali dalam hal kegiatan ekonomi.

Adapun landasan kegiatan ekonomi menurut perspektif Ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep yaitu:¹⁷

1) Keimanan kepada Allah (tauhid)

Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktifitas baik yang menyangkut ubudiah/ibadah mahdah (berkait sholat, zikir, shiam, tilawat al-qur'an dan sebagainya), muamalah (termasuk ekonomi)¹⁸. Tauhid adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya:

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ فَإِذَا يَفْعَلُونَ

Terjemahan:

¹⁷Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 3.

¹⁸ Ibid.

“Allah berfirman, “Janganlah kamu menyembah dua tuhan. Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.”

Disini Allah subhanahu wa ta’ala menginformasikan dan menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Dia, ibadah penghambaan dan penyembahan tidak layak melainkan hanya kepada-Nya semata tidak ada sekutu bagi-Nya, karena Dia adalah Pemilik, Pencipta, Penguasa dan Rabb segala sesuatu.¹⁹

Upaya yang dilakukan pemerintah bersama Dinas Sosial melalui pemberian bantuan sosial merupakan langkah yang bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat. Dengan adanya pengentasan kemiskinan, masyarakat dimudahkan untuk melakukan usaha secara mandiri yang secara tidak langsung mempermudah manusia dalam beribadah.

2) Kepemimpinan (khilafah)

Manusia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta’ala yang dijadikan sebagai khalifah dimuka bumi sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta’ala:²⁰

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ
الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahan:

“ Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya

¹⁹Wahbah az-Zuhaili, ATafsir al-Munir Jilid 4: Aqidah, Syari’ah, dan Manhaj (Depok: Gema Insani, 2005), 406.

²⁰Al-Qur’an dan Terjemahan RI, 217.

Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-An'am: 165).

Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan khalifah di bumi, sebagian dari mereka menggantikan sebagian yang lain di bumi, Dia membinasakan orang-orang sebelum mereka dari abad-abad yang lalu dan umat-umat yang telah lewat, lalu Dia memberikan kekuasaan kepada orang-orang setelah mereka untuk memakmurkan bumi, Dia juga menjadikan mereka penguasa di bumi-Nya, mereka memiliki bumi itu dan berbuat di dalamnya.²¹

Setiap manusia adalah pemimpin, baik pemimpin untuk dirinya sendiri, keluarga, kelompok maupun pemimpin dalam masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban tertentu sesuai dengan kepemimpinannya. Dalam hal ini, pemerintah serta Dinas Sosial Kota Palu selaku pihak yang mengemban salah satu tugas dalam mensejahterakan masyarakat Kota Palu melalui wewenangnya berupa program yang dapat mengatasi masalah kemiskinan dengan tujuan kesejahteraan.

3) Keadilan

Keadilan merupakan perwujudan sikap yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini pemerintah bersama Dinas Sosial dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberian bantuan sosial harus memiliki sifat adil. Perintah berlaku adil sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلنَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

²¹Wahbah az-Zuhaili, ATafsir al-Munir Jilid 4: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj (Depok: Gema Insani, 2005), 396.

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil.”

Sikap adil adalah lebih dekat kepada ketakwaan daripada sikap mengabaikan keadilan. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman jadilah kamu sekalian orang-orang yang senantiasa menegakkan kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena manusia dan bukan pula karena menginginkan sum'ah (popularitas, ketenaran, ingin dipuji orang. Yaitu dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala apa yang kamu perbuat dalam urusan agama dan dunia kalian²².

Dalam pengembangan kegiatan ekonomi, di dalam Islam memiliki karakteristik tertentu. Adapun karakteristik ekonomi Islam adalah sebagai berikut:²³

1) Bersumber dari Illahiyah

Sumber awal ekonomi Islam merupakan bagian dari muamalah berbeda dengan sumber sistem ekonomi lainnya karena merupakan peraturan dari Allah. Ekonomi Islam dihasilkan dari agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali²⁴. Dalam melakukan upaya pengentasan kemiskinan pemerintah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan-kebijakan serta program-program tertentu. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Palu sebaiknya melaksanakan setiap

²²Wahbah az-Zuhaili, ATafsir al-Munir Jilid 4: Aqidah, Syari'ah, dan Manhaj (Depok: Gema Insani, 2005), 450.

²³Zulkifli Rusby, Ekonomi Islam (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 5.

²⁴Ibid, 6.

programnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang ada dalam sistem ekonomi Islam seperti adil, jujur dan amanah.

2) Unsur Pengetahuan dan Berimbang

Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi Islam berposisi diantara aliran individu (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi dan siapapun, dan aliran sosialis (komunis) yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya ke dalam kepemilikan bersama menempatkan di bawah dominasi negara.²⁵

Dalam hal ini, negara memiliki wewenang untuk memanfaatkan segala sumber daya untuk melakukan pengentasan terhadap masalah kemiskinan dan membagi tugas kepada lembaga-lembaga terkait di daerah, salah satu lembaga daerah yang melakukan penanganan kemiskinan adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial dalam melakukan pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada tidak boleh mengintervensi sumber-sumber tersebut untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan masalah penanganan kemiskinan.

3) Ekonomi Berkecukupan dan Berkeadilan

Ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian, dimana manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya dan tidak hanya untuk mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja, ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia²⁶. Dalam hal ini pemerintah memanfaatkan segala sumber

²⁵Ibid, 7.

²⁶Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 7.

daya yang ada untuk kepentingan masyarakat demi tercapainya tujuan kesejahteraan di tengah permasalahan kemiskinan yang ada.

4) Ekonomi Pertrumbuhan dan Keberkahan

Ekonomi Islam memiliki kelebihan dari sistem lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta secara legal, agar tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari meditasi jaminan kebutuhan pokok bagi manusia, hal itu hanya dapat terwujud dalam usaha keras untuk menumbuhkan kemitraan dan memperluas unsur-unsur produksi demi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan keberkahan secara kebersamaan²⁷. Usaha yang dilakukan adalah melalui perputaran modal di tengah masyarakat dalam bentuk modal produksi sebagai kontribusi terhadap aturan-aturan yang dikembangkan²⁸. Dalam hal ini, pemerintah bersama Dinas Sosial Kota Palu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai modal untuk memulai maupun mengembangkan usaha melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Modal Usaha (BMU), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta bantuan peralatan usaha bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

²⁷Ibid, 8.

²⁸Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017), 8.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu diupayakan melalui program pemberian bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Modal Usaha (BMU), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pemberian bantuan Pemerintah Bersama Dinas Sosial Kota Palu kepada masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Palu sudah berjaya cukup baik. Dengan adanya bantuan tersebut masyarakat menjadi terbantu dalam mengatasi masalah sosial ekonominya, dengan menggunakan bantuan dari pemerintah sebagai modal usaha maupun untuk mengembangkan usah yang pada akhirnya berpengaruh dalam mengatasi kemiskinan.
2. Dalam berjalannya program bantuan sosial, ada faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya program bantuan sosial dengan baik. Adapun faktor pendukung yaitu adanya minat masyarakat mengikuti program bantuan sosial dan adanya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan bantuan sosial. Faktor pendukung lainnya seperti seperti bagi penerima bantuan sosial yang berperan aktif dalam setiap kegiatan, adanya kerjasama dan dukungan dari tokoh masyarakat, minat masyarakat untuk berkembang tinggi,

sumber daya alam, adanya hubungan baik antar anggota penerima bantuan sosial serta interaksi yang baik dari semua pihak terkait. Adapun faktor penghambat yaitu adanya sikap yang tidak profesional dari sebagian pendata yang bertugas untuk mendata calon penerima bantuan sehingga sebagian data calon penerima bantuan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Faktor penghambat lainnya berasal dari sisi penerima bantuan, dimana sebagian anggota yang ada di dalam kelompok selaku penerima bantuan masih kurang solid, dan sebagian penerima bantuan sosial belum mampu mengelola bantuan sosial yang telah diterima secara optimal.

B. Saran

Melalui penelitian “Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Kota Palu” ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota dan Dinas Sosial Kota Palu sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap pendataan calon penerima bantuan sosial, agar bantuan sosial yang akan diberikan lebih tepat sasaran. Selain itu, diharapkan agar Dinas Sosial Kota Palu lebih, menekankan sikap profesional kepada setiap pegawainya demi berjalannya setiap program dengan baik.
2. Bagi para penerima bantuan sosial baik Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Modal Usaha (BMU), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) maupun Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebaiknya melakukan pengelolaan bantuan sosial yang diterima dari pemerintah secara optimal dengan sebaik-baiknya agar masalah sosial ekonomi bisa lebih teratasi sehingga dapat mempengaruhi dala menanggulangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Dasril. "Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak: Studi Kasus di Kecamatan Sei Mandau" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2013.
- Al-Qur'an dan Terjemahan RI, 217.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal." (Salatiga: LP2M-Press, 2015).
- Barlinti, Yeni Salma. "Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan." *Lex Journalica*, vol. 4 no. 3 (2007).
- Dokumen Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kota Palu
- Drajat, Anwar Hakim dan Septa Ekasari. "Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Blita." *JURNAL TRANSLITERA*, vol. 10 no. 1 (2001).
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR Ruzz Media, 2012.
- Heryanti. "Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan: Perspektif Undang Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Al-Dustur*, vol. 2 no. 2 (Desember 2019).
- Itang. "Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan." *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, vol. 16. no. 1 (Januari-Juni 2015).
- Lantaeda, Syaron Brigette, Florence Daicy J. Lengkong, dan Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 04. no. 048 (2017).
- Lubis, Siti Abidah. "Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Grasindo, 1996.
- Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR, 2017

- Sabarisman, Muslim. "Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinaan di Kota Sukabumi." *SOSIO KONSEPSIA*, vol. 4 no. 03 (Mei-Agustus 2015).
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soraya, Ira. "Peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan PMI Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.
- Suriyanti, Ariska. "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin di Kota Makassar" Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2021.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Kepada Dinas Sosial Kota Palu

1. Bagaimana Profil Dinas Sosial Kota Palu?
2. Apa saja tugas Dinas Sosial Kota Palu?
3. Bagaimana keadaan kemiskinan di Kota Palu?
4. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Palu?
5. Apa saja faktor pendukung Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan?
6. Apa saja faktor penghambat Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan?

B. Pertanyaan Kepada Penerima Bantuan

1. Apa saja bantuan yang Sdr/Sdri, Bpk/Ibu terima dari Pemerintah Kota Palu?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan Sdr/Sdri, Bpk/Ibu setelah menerima bantuan sosial?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Kepala Bagian Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Palu Bpk. Sarfan Da'a



Wawancara dengan Pegawai Umum Dinas Sosial Kota Palu



Wawancara dengan Bu Marwah Pegawai Bagian penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Palu



Wawancara dengan Bu Salsa Pegawai bagian Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Palu



Wawancara dengan Penerima Bantuan Sosial

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Aliyafie
Tempat Tanggal Lahir : Galuga, 23 Mei 1998
NIM : 16.3.12.0018
Alamat Rumah : Desa Tatari
Kecamatan Tojo Barat
Kabupaten Tojo Una-Una
No. WA : 081245648663
Facebook : Al
Nama Ayah : Rapit
Nama Ibu : Hadijah



B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun lulus : SD Negeri Tatari, 2010
2. SMP/MTs, Tahun lulus : MTS Al-Khairaat Uekuli, 2013
3. SMA/MA, Tahun lulus : MA Al-Khairaat Uekuli, 2016

Palu, 20 Januari 2022 M
18 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis

M. ALIYAFIE
NIM. 16.3.12.0158